ISSN 1411-1179
Vol. 4, No. 3, Oktober 2002

JURNAL ILMIAH
ASSETS

**WIDYA MANGGALA SCHOOL OF ECONOMICS
(SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA MANGGALA)**

**SK Ketua STIE Widya Manggala Semarang
No. 152/II.15/STIE-WM/IX/99**

*Pemimpin Umum
Iin Indarti*

*Pemimpin Redaksi
Dani Isworo*

*Dewan Redaksi
E. Setiawan
Nurdhiana
Yeni Kuntari
Tjandra Tirtono*

*Redaktur Ahli
Rusli Ramli (Universitas Indonesia Jakarta)
Soelistiyo (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)*

*Divisi Luar Negeri
Vidia Suryani*

*Pelaksana Teknis
N.S. Wahdy*

*Alamat Redaksi/Penerbit
Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE Widya Manggala
Jl. Sriwijaya 32 & 36, Semarang 50242
Telp: (024) 8311982, 8312036, 8318788, fax: (024) 443629*

Jurnal ASSETS terbit tiga kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari,
Juni, dan Oktober.

JURNAL ILMIAH
A\$\$ET\$

WIDYA MANGGALA SCHOOL OF ECONOMICS
 (SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA MANGGALA)

Vol. 4, No. 3, Oktober 2002

DAFTAR ISI

1. Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Besarnya Tingkat <i>Underpriced</i> di Bursa Efek Jakarta - <i>Mudrik Al Mansur</i>	141-155
2. Inflasi Akibat Kenaikan Bahan Bakar Minyak - <i>Nugraeni</i>	156-162
3. Pengaruh Partisipasi Pemakai pada Keberhasilan Pengembangan Sistem Informasi dengan Kompleksitas Sistem dan Keterlibatan Pemakai sebagai Variabel Moderating - <i>Agung Yulianto</i>	163-177
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Asimetri Informasi di Sekitar Tanggal Publikasi Laporan Keuangan - <i>Yetti Iswahyuni dan Pancawati Hardiningsih</i>	178-189
5. Pengaruh Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap <i>Turnover Intention</i> Akuntan Publik Di Kota Semarang - <i>Yeni Kuntari dan Ariel Sasti Karuniawan</i>	190-198
5. Analisis Faktor yang Menjadi Preferensi Pihak Ke III Dalam Memilih Lembaga Keuangan Bank Swasta dan Bank Pemerintah - <i>Heri Sartono</i>	199-210
7. Tinjauan Sistem Nilai Tukar Mata Uang dan Penerapannya di Indonesia - <i>Suhaji</i>	211-218

INFLASI AKIBAT KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK

Nugraeni

Staff Pengajar STIE YKP YOGYAKARTA

ABSTRAK

Krisis moneter yang dimulai pertengahan tahun 1997 sampai sekarang benar-benar merupakan sebuah tragedi ekonomi. Krisis yang tidak dapat diprediksi membawa dampak yang besar serta luas bagi perekonomian nasional. Dampak krisis moneter tidak hanya pada skala industri besar dan juga industri menengah dan kecil, dan lebih jauh menjangar keseluruhan lapisan sosial. Sampai sekarang terdapat banyak langkah yang telah dilakukan oleh authority moneter dan institusi pemerintah lainnya untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Presiden Megawati Sukarno mengemukakan bahwa keuangan negara secara umum sangat kompleks dan tidak banyak alternatif yang dapat dipilih, hal tersebut mengapa pemerintah mencari beranake ragam alternatif yang dapat dirasakan oleh semua tingkat sosial. Pemerintah menaikkan tarif dan harga berbagai macam barang seperti minyak dan tarif dasar listrik. Kenaikan harga bahan bakar minyak yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari menyebabkan kenaikan inflasi yang disebabkan kenaikan biaya produksi dari komoditi yang menggunakan bahan bakar minyak

Kata Kunci : Inflasi, Bahan Bakar Minyak

ABSTRACT

The monetary crisis that felt since middle 1997 until now on is really an economic tragedy. The crises that came suddenly and could not be predicted before obviously bring a big and wide impact for national economy. This impact of monetary crisis not only felt by big scale industry but also felt by middle and small industry, furthermore spread to all social stratum. Until now, there has been a lot of steps done to solve establish by monetary authority and another government institution to safe national economy. Mrs. President Megawati Sukarnoputri admitted that generally state finance is complicated and not much better alternative that can be chosen. That is why government keeps searching for various better alternative that can be accepted by all social stratum for national interest shake in this crisis moment. Comply the government periodically raise tariffs and price many kind of goods and services, such as fuel and electricity floor tariff (tarif dasar listrik). Related to the raise of fuel price it can not be avoided that the raise of fuel can trigger the raise of inflation caused by increasing production cost of commodities that consuming fuel.

Keyword: Inflation, fuel

I. PENDAHULUAN

Krisis moneter yang mulai dirasakan sejak pertengahan tahun 1997 hingga sekarang ini benar - benar merupakan suatu 'tragedi ekonomi'. Krisis yang datangnya secara tiba - tiba dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya ternyata membawa dampak yang cukup besar dan luas pada perekonomian nasional. Dampak krisis moneter ternyata tidak hanya dirasakan oleh dunia usaha berskala besar, namun juga dirasakan oleh industri - industri menengah dan kecil, bahkan meluas ke semua lapisan masyarakat.

Hingga sekarang ini telah banyak langkah pemecahan yang dilakukan oleh otoritas moneter dan lembaga pemerintah lainnya untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Langkah - langkah pemecahan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia bersama - sama dengan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) ternyata belum membawa hasil yang berarti. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah berunding dengan Dana Moneter Internasional (IMF) agar melonggarkan peredaran uang untuk mendorong kegiatan ekonomi di Indonesia, meskipun ada resiko peningkatan

inflasi (Harian Bernas, 9 Oktober 2001). Pada sisi lain, pemerintah menghadapi defisit anggaran, sehingga mengejar pendapatan lewat pajak dan penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Tarif Dasar Listrik (TDL) yang sebenarnya semakin memperberat dunia usaha.

Untuk mengatasi defisit anggaran APBN 2001, tampaknya tidak ada pilihan lagi bagi pemerintah untuk segera mengambil sikap yang lebih kongkrit, meski sangat menyulitkan. "Kenaikan harga BBM merupakan satu - satunya opsi untuk penyelamatan negara," kata Bambang Yudhoyono. Tanpa opsi tersebut itu akan terjadi kebangkrutan pada ekonomi nasional. (Harian Kedaulatan Rakyat, 18 Mei 2001).

Pemerintah akhirnya melaksanakan kenaikan harga BBM sebesar 30,1 persen mulai 16 Juni 2001. Kenaikan ini sempat tertunda satu hari, karena direncanakan sebelumnya tanggal 15 Juni 2001. Namun pada akhirnya DPR menyetujui pula diberlakukannya kenaikan BBM ini, yaitu mulai pukul 00.00 tanggal 16 Juni 2001. Selain kenaikan BBM dan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 20 persen, pemerintah juga akan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 2,5 persen, sehingga PPN yang tadinya 10 persen akan menjadi sebesar 12,5 persen. Kenaikan harga BBM dan tarif listrik ini merupakan bagian untuk penyesuaian dalam perubahan APBN 2001, untuk tetap mempertahankan defisit anggaran sebesar 3,7 persen dari PDB.

2. PEMBAHASAN

2.1. Dampak Kenaikan BBM

Kenaikan harga BBM ini akan menimbulkan dampak terhadap kenaikan harga sembilan bahan pokok dan tarif angkutan kota di sejumlah daerah. Produk - produk pertanian lebih rentan terhadap peningkatan harga BBM karena biasanya produk pertanian tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Selain itu, produk pertanian harganya juga sangat tergantung pada supply dan demand para konsumen. Kalau barang tersedia banyak dipasar induk namun pembelinya sedikit maka harganya akan turun. Dalam hal ini, maka petani yang akan menderita kerugian. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM menyebabkan pula terjadinya efek ganda pada industri kecil, apalagi disusul kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik) pada bulan Juli. Dampak langsung dari sulitnya usaha kecil ini adalah pada peningkatan semua harga komponen dan bahan baku industri. Padahal sebelumnya akibat krisis ekonomi saja beberapa pengusaha kecil terpaksa mengurangi tenaga kerja atau menutup usahanya akibat semakin berkurangnya order dari pasar.

"Kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik berpengaruh kepada melonjaknya biaya produksi, sehingga produsen akan melakukan penyesuaian harga jual". (Bisnis Indonesia, 18 Juni 2001).

Dipihak lain, usaha perhotelan juga menerima dampak kenaikan ini. Secara tidak langsung memang tidak akan mempengaruhi biaya operasi, tetapi biaya perawatan mesin yang menggunakan spare part tertentu akan merasakan dampaknya sehingga mengakibatkan tambahan biaya. Menurut Diyak Mulahela, ketua umum Asosiasi Kontroler Jakarta, dalam harian Bisnis Indonesia, 18 Juni 2001 mengatakan ; " Hotel itu sama dengan engineering, karena beroperasinya hotel ditentukan oleh kualitas engineering. Jika akibat kenaikan BBM itu mempengaruhi hotel dengan biaya tambahan sampai diatas 2 persen maka akan sangat memberatkan hotel. Selama ini total biaya yang ditanggung hotel saja sebesar 13 persen - 15 persen dari pendapatan "

Industri perhotelan selama ini menanggung dua macam biaya, yaitu energy cost sebesar 6 persen dan maintenance cost sebesar 7 persen. Sedangkan untuk biaya - biaya; biaya energi yang paling besar adalah biaya listrik sebesar 75 persen, biaya BBM sebesar 7 persen dan sisanya biaya lain - lain (telepon dan air). Dengan demikian beban biaya yang ditanggung hotel semakin terasa berat, apalagi saat tarif listrik sebesar 17,47 persen nantinya.

Kalau sampai total biaya hotel diatas 15 persen, apalagi sebesar 20 persen jelas sangat membebani hotel. Itu artinya gross operating profit hotel hanya sebesar 80 persen. Padahal

hotel juga mempunyai sejumlah kewajiban lain yang harus dipenuhi, seperti kewajiban membayar para pemasok, membayar bunga bank dan kewajiban mengupah karyawan.

Pada awal - awal kenaikan harga BBM, terjadi pemogokan sejumlah sopir disejumlah kota dalam skala yang berbeda - beda. Hal ini disebabkan kenaikan harga BBM tersebut yang tidak dibarengi penyesuaian tarif angkutan. Akibatnya, aktivitas ratusan ribu warga terganggu dengan tidak beroperasinya sebagian angkutan umum. Di ibukota sendiri, situasinya diperburuk oleh aksi demonstrasi penuh kekerasan menentang kenaikan harga bahan bakar minyak rata - rata 30,1 persen. Bentrokan pisik antara aparat keamanan dan demonstran tercetus antara lain disekitar kampus IAIN Syarif Hidayatullah, Ciputat dan didepan kampus Fakultas Hukum UKI, Jalan Diponegoro Jakarta.

2.2. PENYEBAB INFLASI

Inflasi merupakan salah satu penyakit ekonomi makro yang merupakan target kebutuhan pemerintah, meskipun inflasi dapat menjadi sumber pembiayaan defisit anggaran pemerintah yang dinamakan dengan inflation tax. Inflasi itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kecenderungan kenaikan harga - harga umum dari barang - barang dan jasa secara terus - menerus (Dornbusch and Fisher, 1990).

Dalam perekonomian, walaupun semua faktor produksi sudah digunakan kadang - kadang masih terdapat permintaan atas produk yang belum terpenuhi. Dengan kata lain, dalam perekonomian terdapat kelebihan pengeluaran agregat diatas produksi barang dan jasa. Keadaan ini menimbulkan kenaikan harga. Inflasi yang ditimbulkan oleh akses permintaan disebut " Inflasi tarikan permintaan". Kenaikan harga barang juga dapat timbul karena kenaikan biaya produksi, yang disebut inflasi desakan ongkos. Kenaikan ongkos produksi dapat disebabkan oleh kenaikan upah, atau kenaikan harga faktor produksi lainnya.

Berdasarkan lajunya, inflasi dibedakan menjadi inflasi merangkak dan inflasi liar (hyperinflasi). Inflasi merangkak adalah inflasi dimana kenaikan harga terjadi sangat lambat, kurang lebih 5 persen per tahun. Sedangkan inflasi liar terjadi apabila harga naik berlipat - lipat dalam waktu yang pendek. Di Indonesia misalnya, pada tahun 1965 dan 1966 terjadi inflasi sebesar 500 persen dan 650 persen.

Beberapa ahli ekonomi berpandangan, inflasi merangkak diperlukan untuk menggalakkan perkembangan ekonomi. Mereka berpendapat kenaikan harga barang lebih mudah terjadi daripada kenaikan tingkat upah. Akibatnya keuntungan pengusaha menjadi bertambah besar karena penghasilannya bertambah lebih cepat daripada ongkos produksi. Keadaan ini mendorong para pengusaha menambah produksi dan melakukan investasi. Langkah pengusaha ini akan mengurangi pengangguran dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Inflasi liar biasanya terjadi dalam perekonomian yang sedang menghadapi perang atau kekacauan politik di dalam negeri. Peristiwa ini memaksa pemerintah menambah anggaran belanjanya. Kenaikan pembelanjaan ini menyebabkan kenaikan yang besar pada permintaan agregat. Sektor perusahaan biasanya tidak sanggup memenuhi permintaan yang besar dan tiba - tiba. Oleh karena mengurangi pengeluaran tidak dapat dilakukan, pemerintah dapat menekan inflasi liar dengan membatasi jumlah barang yang dapat dibeli seseorang dari suatu perusahaan.

Keuangan defisit merupakan metode paling mujarab bagi peningkatan pembangunan ekonomi di negara terbelakang. Sifat dasar perekonomian negara terbelakang biasanya sedemikian rupa sehingga investasi swasta tidak cukup besar karena berbagai faktor sosial, ekonomi dan kelembagaan. Oleh karena itu laju investasi netto menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan memperhitungkan sumber - sumber yang cukup untuk membiayai investasi negara, pemerintah perlu menempuh metode keuangan defisit.

Keuangan defisit di samping bermanfaat untuk mengembangkan overhead sosial dan ekonomi, juga dapat berguna untuk memupuk tabungan. Pada waktu pemerintah menempuh keuangan defisit berarti ia mengambil sumber - sumber riil dari masyarakat. Transfer itu terjadi secara diam - diam pada waktu pemerintah membeli barang dan jasa untuk kepentingan sendiri. Dengan adanya kelangkaan sumber riil maka hanya ada sedikit sisa yang dapat dipergunakan oleh rakyat yang dipaksa menabung itu.

Belanja defisit oleh negara dapat meningkatkan lapangan kerja, output dan pendapatan. Kenaikan pendapatan cenderung menaikkan permintaan barang konsumsi. Karena penawaran tidak cukup maka harga naik. Keuangan defisit mengandung bahaya tertentu. Ia dapat menimbulkan inflasi. Kenaikan harga yang berkepanjangan merupakan cara memacu pembangunan ekonomi yang mengandung bahaya.

Ada 4 bahaya sehubungan dengan keuangan defisit :

1. Pertambahan mata uang menyebabkan pertambahan uang beredar melalui perluasan kredit.
2. Tidak ada penawaran barang secara langsung atas investasi pemerintah.
3. Ketiadaan surat - surat berharga yang dapat dijual.
4. Kegagalan meningkatkan produktivitas karena administrasi negara yang baik.

Inflasi mengandung bahaya. Inflasi merangsang transaksi spekulatif yang tidak perlu. Hal ini menghambat pembangunan ekonomi, menghambat tabungan domestik dan investasi asing, menghancurkan hubungan perdagangan luar negeri dan menurunkan efisiensi produk.

Sehubungan dengan adanya kenaikan harga BBM, maka tidak dapat dihindari bahwa kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan laju inflasi. Diyakini bahwa BBM merupakan komoditi strategis yang memiliki daya penyebaran (backward linkages) cukup tinggi. Bahkan baru ada isu pemerintah akan menaikkan harga BBM, hampir semua komoditi dan sektor terkait melakukan adjustmen harga produknya. Paling menderita dari efek tersebut adalah masyarakat rumah tangga kalangan menengah kebawah dengan penghasilan kecil.

Melihat penyebab inflasi, dengan diberlakukannya kenaikan harga BBM akan terjadi cost - push inflation, yaitu inflasi akibat naiknya ongkos produksi komoditi - komoditi yang meng-input BBM. Barang - barang industri, transportasi dan listrik tentunya dengan cepat ingin menyesuaikan harga produksinya. Dengan demikian, apabila pemerintah tetap menaikkan Tarif Dasar Listrik inflasi di Indonesia tentu bertambah besar.

Kemudian untuk kebutuhan rumah tangga secara langsung, seperti minyak tanah, akan menambah pengeluaran mereka. Dengan demikian rumah tangga mendapat dua kali efek kenaikan harga BBM. Pertama pembelian secara langsung dan kedua akibat konsumsi barang - barang industri dan transportasi.

Dari sejumlah informasi diperoleh masukan bahwa kenaikan harga BBM sebesar 30,1 persen dapat meningkatkan laju inflasi sekitar 1,35 - 1,48 persen, kenaikan Tarif Dasar Listrik sebesar 17,47 persen mendorong laju inflasi sebesar 0,37 - 0,53 persen dan kenaikan tarif telepon seperti yang telah direncanakan pula sebesar 21,6 persen akan meningkatkan inflasi sebesar 0,42 - 0,55 persen. Dengan demikian secara total bila kebijakan kenaikan tiga harga komoditi ini dilaksanakan secara bersamaan akan mendorong tambahan inflasi sebesar 2,14 - 2,56 persen. Angka ini dapat diartikan sebagai tambahan inflasi yang akan terjadi sebelum adanya kebijakan kenaikan BBM, listrik dan telepon. Bila pada bulan Juli 2001 inflasi diperkirakan 1,28 persen (dianggap sama dengan inflasi bulan Juli 2000) maka tahun 2001 ini inflasi pada bulan Juli dapat mencapai 3,42 - 4,02 persen. Perkiraan ini didasarkan pada asumsi bahwa selang (time - log) pengaruh pengganda ekonomi harga hanya membutuhkan waktu satu bulan lamanya dan kebijakan ketiga harga administrasi diatas dilaksanakan secara bersamaan pada awal bulan Juli.

Deputi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kuswandi Saleh menyatakan perlu usaha ekstra keras dari pemerintah untuk mempertahankan laju inflasi selama tahun 2001 berada pada satu digit (kurang dari 10 persen) (Harian Bernas, 9 Oktober 2001). Seperti dugaan kita untuk tahun 2001, berat kemungkinan bagi pemerintah untuk mempertahankan pada satu digit.

Berdasarkan pengalaman tahun - tahun sebelumnya, laju inflasi pada bulan September dan Oktober memang mengalami penurunan tapi akan meningkat pada November dan Desember. Hingga beberapa bulan kedepan, sebarangapun rendahnya laju inflasi namun bulan Desember ketika terdapat banyak hari besar nasional, laju inflasi sudah pasti merupakan tantangan berat bagi pemerintah.

Deputi Bidang Statistik dan Ekonomi Makro Badan Pusat Statistik (BPS), Slamet Mukeno mengungkapkan, inflasi untuk bulan September tahun 2001 tercatat sebesar 0,64 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Agustus 2001 yang mengalami deflasi sebesar

0,21 persen (Harian Kedaulatan Rakyat, 3 Oktober 2001). Secara kumulatif laju inflasi tahun kalender Januari - September 2001 sudah mencapai 8,16 persen. Sementara inflasi year on year (September 2001 dibanding September 2000) mencapai 13,01 persen. Laju inflasi tersebut lebih tinggi dibanding inflasi Agustus (year on year) sebesar 12,23 persen. Inflasi September tahun ini merupakan inflasi bulanan tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Sebab pada September 1999 terjadi deflasi sebesar 0,69 persen dan September 2000 deflasi 0,06 persen.

Inflasi September terjadi karena adanya kenaikan harga pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,60 persen, kelompok perumahan 1,68 persen, sandang 0,67 persen, kesehatan 0,14 persen, pendidikan, rekreasi dan olahraga 2,13 persen, serta kelompok transportasi dan komunikasi 0,75 persen. Sedangkan kelompok bahan makanan mengalami penurunan sebesar 0,73 persen. Jika dilihat dari besarnya sumbangan terhadap tingkat inflasi, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau menyumbang sebesar 0,11 persen, kelompok perumahan 0,37 persen, sandang 0,06 persen, kesehatan 0,01 persen, pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,17 persen serta transportasi dan komunikasi 0,09 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi Oktober 2001 sebesar 0,68 persen, atau naik 4 basis poin dibanding September sebesar 0,64 persen. Sementara itu inflasi year on year (Oktober 2001 dibanding Oktober 2000) mencapai 12,47 persen atau lebih rendah dibanding bulan September sebesar 13,01 persen. Dengan perkembangan tersebut laju inflasi selama tahun kalender Januari - Oktober tercatat sebesar 8,89 persen. Inflasi bulan Oktober terjadi karena kenaikan harga pada kelompok bahan makanan sebesar 1,16 persen, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,46 persen, perumahan 0,42 persen, sandang 1,95 persen, kesehatan 0,27 persen, pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,29 persen, serta transport dan komunikasi 0,11 persen. Jika dilihat dari besarnya sumbangan inflasi, kelompok bahan makanan memberi kontribusi sebesar 0,29 persen, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,09 persen, perumahan 0,09 persen, sandang 0,17 persen, kesehatan 0,01 persen, pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,02 persen serta kelompok transport dan komunikasi 0,01 persen. Hingga saat ini kecenderungan laju inflasi masih tinggi. (Harian Kedaulatan Rakyat, 2 November 2001).

Sedangkan menurut konsep inflasi ini adalah inflasi yang bersumber dari sisi permintaan, khususnya yang disebabkan oleh instrumen kebijakan moneter dan bukan yang bersumber dari kebijakan fiskal. Pengukuran inflasi utama (head line inflation), yakni perkembangan indeks harga konsumen (IHK), merupakan harga yang terjadi karena interaksi permintaan dan penawaran. Dengan kata lain, indeks harga konsumen tersebut dapat terjadi karena pergerakan penawaran (supply shock), misalnya karena kenaikan harga energi atau harga input. Dengan demikian, penggunaan inflasi inti dimaksudkan untuk mengukur inflasi yang sudah bersih dari pengaruh supply shock dan kebijakan fiskal.

Hal ini didasarkan bahwa perhitungan inflasi belum tentu sesuai dengan kenyataan yang ada karena dua alasan :

1. Akibat kenaikan harga alamiah setiap bulan.
2. Produsen biasanya meningkatkan harga bukan hanya karena alasan akibat biaya BBM, listrik dan telepon, tetapi terselubung agar mendapat keuntungan sesaat. Sedangkan kebijakan pemerintah hanya dipakai sebagai alat untuk pengesahan (legitimate) meningkatkan harga bagi mereka.

Akibat alasan terakhir maka kita tak perlu heran bila para kondektur bus atau mikrolet tiba-tiba menaikkan tarif penumpang lebih tinggi dari biasanya.

Berikut data mengenai Perkembangan kenaikan / penurunan harga tiga jenis BBM selama 1990 - 2001 dalam Rp / liter.

Tabel 1
Kenaikan Harga BBM dari Tahun 1990-2001

Tahun	Tanggal	Premium	%	Minyak tanah	%	Minyak Solar	%
1990	24 Mei	450	-	190	-	245	-
1991	11 Juni	550	22,22	220	15,79	300	22,45
1993	8 Januari	700	27,27	280	21,43	380	26,66
1998	5 Mei	1.200	71,43	350	25	600	57,89
	16 Mei	1.000	-16,66	280	-20	550	-8,33
2000	1 Oktober	1.150	15	350	25	600	9,09
2001	16 Juni	1.450	26,08	400	14,28	900	50

Sumber : Pertamina

2.3. PENDAPATAN SEKTOR MINYAK SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI

Pada dekade tahun 1974 - an, besarnya penerimaan negara dan cadangan devisa dari hasil ekspor minyak mengakibatkan besarnya penyediaan kredit likuiditas. Besarnya jumlah penerimaan yang berasal dari sektor minyak tersebut dikenal dengan istilah boom minyak dan merupakan salah satu sumber penyebab tingginya kembali tingkat inflasi. Kebijakan moneter yang ditempuh oleh pemerintah pada periode boom minyak ini antara lain :

- Penetapan pagu kredit (credit ceiling) dan aktiva lain.
- Menaikkan suku bunga kredit bank - bank pemerintah
- Menaikkan tingkat bunga deposito berjangka waktu 18 bulan dan 24 bulan serta tingkat bunga Tabanas.
- Menaikkan presentase cadangan likuiditas wajib.

Kebijakan moneter merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Karena keuntungan dari kebijakan moneter ini merupakan faktor yang dapat dikontrol oleh pemerintah sehingga dapat dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Sedangkan kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat. Indikator yang biasa dipakai untuk kebijakan fiskal ini adalah budget defisit, yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran transfer) dengan penerimaan (terutama dari pajak).

Berkaitan dengan permasalahan kenaikan harga BBM, dalam hal ini, pemerintah ingin / berusaha untuk menutupi defisit anggaran belanjanya. Dengan demikian diharapkan peningkatan pendapatan sektor minyak ini dapat menekan defisit anggarannya, karena subsidi BBM tentu akan berkurang. Hal ini telah berdampak pada peningkatan harga dan tentunya juga peningkatan pajak, yang berarti pemerintah telah menerapkan kebijakan fiskal didalamnya. Namun defisit ini bukan merupakan indikator yang bagus bagi kebijakan fiskal. Hal ini disebabkan, pertama, penerimaan pajak dan transfer tergantung dari pendapatan. Oleh karena itu semua faktor yang mempengaruhi defisit anggaran pemerintah ini adalah kebijakan moneter.

Kebijakan moneter yang ekspansif cenderung menaikkan pendapatan, sedangkan yang kontraktif cenderung menurunkan pendapatan. Pada akhirnya kedua - duanya akan mempengaruhi penerimaan pajak, dengan demikian juga akan mempengaruhi defisit anggaran belanja.

Selanjutnya, dalam upayanya menekan / mengatasi laju inflasi terdapat perbedaan antara penganut ekonomi sisi permintaan dengan ekonomi sisi penawaran. Menurut ekonomi sisi permintaan, inflasi bisa ditekan dengan cara menaikkan pajak atau mengurangi jumlah uang beredar, yang kesemuanya ini dapat mengurangi permintaan agregat. Menurut pandangan ekonomi sisi penawaran kebijakan tersebut mempunyai efek negatif terhadap penawaran. Kenaikan pajak akan mengurangi gairah buruh untuk bekerja, sedangkan pengurangan jumlah uang beredar akan mengurangi pembentukan modal. Keduanya akan menaikkan ongkos dan

mengurangi penawaran. Apabila efek turunnya permintaan lebih besar daripada turunnya penawaran, inflasi akan turun. Sebaliknya, apabila penurunan penawaran lebih besar dari permintaan yang ada, maka harga / inflasi akan naik.

3. KESIMPULAN

Krisis moneter yang mulai dirasakan sejak pertengahan tahun 1997 hingga sekarang ini benar - benar merupakan suatu 'tragedi ekonomi'. Krisis yang datangnya secara tiba - tiba dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya ternyata membawa dampak yang cukup besar dan luas pada perekonomian nasional. Dampak krisis moneter ternyata tidak hanya dirasakan oleh dunia usaha berskala besar, namun juga dirasakan oleh industri - industri menengah dan kecil, bahkan meluas ke semua lapisan masyarakat.

Inflasi merupakan salah satu penyakit ekonomi makro yang merupakan target kebutuhan pemerintah, meskipun inflasi dapat menjadi sumber pembiayaan defisit anggaran pemerintah yang dinamakan dengan inflation tax. Inflasi itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kecenderungan kenaikan harga - harga umum dari barang - barang dan jasa secara terus - menerus. Berkaitan dengan permasalahan kenaikan harga BBM, dalam hal ini, pemerintah ingin/berusaha untuk menutupi defisit anggaran belanjanya. Dengan demikian diharapkan peningkatan pendapatan sektor minyak ini bisa menekan defisit anggarannya, karena subsidi BBM tentu akan berkurang. Hal ini telah berdampak pada peningkatan harga dan tentunya juga peningkatan pajak, yang berarti pemerintah telah menerapkan kebijakan fiskal didalamnya. Kenaikan harga BBM tersebut harus diikuti langkah - langkah kompensasi agar lapisan masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM juga mendapatkan kompensasi sosial dan ekonomi, sehingga mengurangi beban mereka.

Jadi dapat disimpulkan kenaikan harga BBM akan menyebabkan inflasi. Hal ini disebabkan kenaikan harga akan menggeser kurva penawaran kekiri, dan permintaan tetap sehingga keseimbangan bergeser keatas. Pada permasalahan tersebut penurunan penawaran lebih besar dari permintaan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- , *Harian Bisnis Indonesia*, 18 Juni 2001
- , *Harian Bernas, PT Muria Baru Offset*, Yogyakarta, 9 Oktober 2001.
- , *Harian Kedaulatan Rakyat, PT - BP Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 18 Mei 2001.
- , *Harian Kedaulatan Rakyat, PT - BP Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 2 November 2001.
- , *Harian Kedaulatan Rakyat, PT - BP Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 3 Oktober 2001.
- M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981.
- Pertamina Indonesia, *Perkembangan Kenaikan/Penurunan harga BBM*
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Lembaga Penerbit FE - UI, Jakarta, 1994.